



Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Barowila

Kusrawan¹, Liswatin², Tasman S Haris³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lakidende, Unaaha, Indonesia

E-mail: choesraone@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-06-20 Revised: 2022-07-28 Published: 2022-08-01 Keywords: <i>Transparency; Competence; Utilization Of Information Technology; Accountability.</i>	<p>This study aims to determine the simultaneous and partial effects of transparency, competence, internal control systems and the use of accountability information technology to the village government in managing village funds. The sampling technique used in this study was purposive sampling, where the sample came from a source that was deliberately selected based on the criteria set by the researcher, so the sample in this study was 48 people in Barowila Village. Data collection techniques were carried out by means of a questionnaire. Data analysis used multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that: 1) Transparency, competence, and the simultaneous use of information technology have a positive and significant effect on the accountability of the village government in managing village funds in Barowila; 2) Transparency has a positive and significant effect on the accountability of the village government in managing village funds in Barowila; 3) Competence has a positive and significant effect on the accountability of the village government in managing village funds in Barowila; 4) The use of information technology has a positive and significant effect on the accountability of the village government in managing village funds in Barowila Village.</p>
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-06-20 Direvisi: 2022-07-28 Dipublikasi: 2022-08-01 Kata kunci: <i>Transparansi; Kompetensi; Pemanfaatan Teknologi Informasi; Akuntabilitas.</i>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial yaitu transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> yaitu dimana sampel berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 48 Orang yang berada di Desa Barowila. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara angket kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Transparansi, kompetensi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Barowila; 2) Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Barowila; 3) Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Barowila; 4) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Desa Barowila.</p>

I. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini telah memposisikan Desa sebagai fokus utama pembangunan, salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan di sektor Desa yaitu dengan pemberian dana Desa langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat Desa untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat dari pinggiran pedesaan. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia di bidang pembangunan terutama peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan di jajaran Desa dapat dilihat dari tingkat kenaikan dana Desa

yang diberikan pemerintah kepada seluruh desa yang ada di Indonesia. Total Dana Desa yang telah tersalur sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berjumlah Rp. 323.320.000.000.000,- dari adanya kenaikan jumlah pengalokasian dana Desa maka setiap desa akan mengelola uang atau dana Desa secara mandiri sebesar Rp. 500.000.000,- hingga Rp. 800.000.000,- per desa.

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang bersumber dari APBN dikemukakan bahwa dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan yaitu sebesar 90% dari dana Desa dialokasikan secara merata ke setiap desa dan 10% dihitung dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislative. Kelahiran Undang-Undang tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang Desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel. Berbagai peraturan tersebut tampaknya belum mampu mengembalikan pada eksistensi sejati Desa sebagai level pemerintahan terendah yang memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri dengan tanpa meninggalkan adat istiadat, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 74.754 desa dan sekitar 8.430 kelurahan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015). Pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pem-

angunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lahir dalam rangka untuk menyempurnakannya.

Menurut Riyanto (2015) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah, dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat memengaruhi kedua aspek tersebut, (Cheng *et al.*, 2002) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa, faktor yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pengendalian dalam pemerintahan, disebabkan adanya sistem pengendalian dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah Desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa tersebut. Ditambahkan oleh Uddin dan Hopper (2001) bahwa pimpinan dalam sebuah organisasi memiliki bentuk pengendalian agar dalam sistem perencanaan (penganggaran desa) output yang dihasilkan memiliki kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Desa.

Pengamatan peneliti di lapangan khususnya di pemerintah Desa tingkat akuntabilitas dan transparansi masih sangat rendah, hal ini didukung dengan temuan yang dipaparkan oleh Indonesia Aksi-Corruption Forum (IACF 2010) yang menyebutkan potensi-potensi penyalah-

gunaan dana Desa disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparat pemerintah Desa dan sistem pengendalian intern. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000), teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi, komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Di sisi lain berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014 pemerintah Desa akan diberikan dana untuk dikelola guna membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Bila mengacu pada PP Nomor 60 tahun 2014 sudah cukup jelas bahwa dana yang diberikan ke masing-masing Desa sangat besar yakni dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis, dana ini cukup besar untuk digunakan oleh pemerintah Desa guna memperbaiki kesejahteraan warga di Desa masing-masing.

Anggaran dana desa sebesar Rp. 46,9 Triliun yang akan digelontorkan oleh pemerintah pusat sebagai implikasi dari lahirnya Undang-Undang tentang Desa ini dinilai rawan korupsi dan dapat menyeret para kepala desa berikutnya ke penjara. Secara umum pemerintah Desa masih belum bisa mengalokasikan dana Desa tersebut sehingga sering terjadi permasalahan dalam hal akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Desa. Di Desa Barowila misalnya, berdasarkan pengamatan peneliti pengetahuan masyarakat terutama pemerintah Desa tersebut masih minim dalam mengelola keuangan dana Desa. Kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah Desa terkait pengelolaan dana Desa masih belum mampu mengelola dana tersebut. Dengan variatifnya karakteristik Desa, kompetensi aparat desa dan regulasi yang relatif baru diduga terdapat cukup banyak potensi penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi. Anggaran desa yang diperoleh oleh setiap pemerintah desa yang

cukup besar tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan, karena menurut pendamping Desa untuk wilayah di Kecamatan mungkin untuk penatausahaan dana Desa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah. Sehingga diperlukan peran perangkat Desa untuk membantu kepala Desa dalam mengelola dana Desa. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana Desa, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi kepala Desa dan aparat Desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang banyak menggunakan angka, dimulai dari pengumpulan data, penafsiran data dan menampilkan hasilnya, selanjutnya penelitian ini dikategorikan sebagai *Explanatory Research* yaitu penelitian yang menjelaskan dan mempertegas hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pemerintah Desa Barowila yang terdiri dari Aparatur Desa, Masyarakat dan Badan Pengawas serta Pendamping Desa sebanyak 48 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sumbernya adalah jawaban responden yang dibagikan ke 48 responden, data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen yang berhubungan dengan variabel yang diteliti dan laporan-laporan. Pengujian kuesioner ini adalah uji validitas dan reabilitas, sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu hasil analisis regresi tersebut dikenai uji asumsi klasik, uji asumsi klasik tersebut merupakan asumsi yang mendasari suatu analisis regresi, hal ini berkaitan dengan keterkaitan variabel prediktor dalam menjelaskan variabel yang diprediksi (Wijaya, 2010:514), uji asumsi klasik meliputi uji multikolonearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F atau secara simultan dengan dasar pengambilan keputusannya adalah nilai $Sig < \alpha$, maka hipotesis yang diajukan diterima, selanjutnya uji t atau secara parsial dengan dasar pengambilan keputusannya adalah nilai $Sig < \alpha$, maka hipotesis yang diajukan diterima.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan digunakan persamaan regresi adalah untuk melakukan dugaan atau taksiran variabel tergantung yang disebabkan oleh variasi nilai variabel bebas, hasil uji regresi Linear Berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	16,688	3,220		5,183	,000	
X1	-,560	,129	-,546	-4,355	,000	,905
X2	,329	,119	,333	2,760	,008	,979
X3	,234	,106	,278	2,215	,032	,906

a. Dependent Variable: Y

Sumber : data primer diolah Tahun 2022

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	51,084	3	17,028	8,754	,000 ^b
Residual	85,583	44	1,945		
Total	136,667	47			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: data primer diolah Tahun 2022

Dari hasil uji regresi berganda diperoleh koefisien regresi, nilai t_{hitung} dan tingkat signifikansi sebagaimana ditampilkan pada tabel-tabel diatas, hasil Analisis Uji Regresi Linear Berganda disajikan pada tabel 3. sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel bebas	Koefisien regresi	T_{hitung}	Signifikan	Ket.
Transparansi (X1)	0,129	4,355	0,000	Signifikan
Kompetensi (X2)	0,119	2,760	0,008	Signifikan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0,106	2,215	0,032	Signifikan

Konstanta (a) = 3,220 dengan t signifikan 5,183

R square = 0,374

N = 48

R = 0,611^a

a = 0,05

F hitung = 8,754

F signifikan = 0,000

Standar error = 1,394

Berdasarkan data pada tabel 3. Persamaan regresi dapat dibuat adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 3,220 + 0,129 X_1 + 0,119 X_2 + 0,106 X_3 + 1,394$$

B. Pembahasan

1. Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah Transparansi, Kompetensi, dan Pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Barowila.. Berdasarkan hasil uji t yakni hasil pengujian simultan antara variabel independent terhadap variabel dependent menunjukkan nilai F 164,983 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai Fhitung positif berarti transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. Maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transparansi, kompetensi, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Barowila.

2. Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Barowila.. Berdasarkan hasil uji t yakni hasil pengujian parsial antara variabel transparansi dengan akuntabilitas menunjukkan nilai thitung 2,454 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05. Nilai thitung positif berarti transparansi berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. Maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Barowila. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rosyidi (2018), dimana hasil yang diperoleh bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. Artinya semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin baik pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa.

3. Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Barowila. Berdasarkan hasil uji t yakni hasil pengujian parsial antara variabel transparansi dengan akuntabilitas menunjukkan nilai thitung 3,899 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai thitung positif berarti transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. Maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Barowila. Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad Rosyidi (2018), dimana hasil yang diperoleh bahwa Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. Artinya semakin banyak aparatur Desa yang memiliki kompetensi didalam bidangnya maka semakin tinggi tingkat kepercayaan pemerintah serta masyarakat terhadap pengalokasian dana Desa. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh arif widyatama (2017) dimana hasil yang diperoleh bahwa kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa.

4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Barowila.. Berdasarkan hasil uji t yakni hasil pengujian parsial antara variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas menunjukkan nilai thitung 3,107 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Nilai thitung positif berarti pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Barowila. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ekasari sugiarti, ivan yudianto (2017), dimana hasil yang diperoleh bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. Artinya bahwa penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur Desa dalam pengelolaan dokumen-dokumen Desa secara keseluruhan sehingga aparatur Desa mampu untuk menginput data secara lebih cepat daripada menggunakan cara manual. Wahyudi (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik secara garis besar dapat memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya, pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi, baik yang disengaja maupun tidak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi, dan pemanfaatan teknologi informasi

secara signifikan berpengaruh terhadap akuntabilitas pememrintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Barowila. Artinya transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik dapat pula meningkatkan akuntabilitas pememrintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Barowila.

2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pememrintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Barowila. Artinya semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin baik pula pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Barowila.
3. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pememrintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Barowila. Artinya semakin banyak aparatur Desa yang memiliki kompetensi didalam bidangnya maka semakin tinggi tingkat kepercayaan pemerintah serta masyarakat terhadap pengalokasian dana Desa di Barowila.
4. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pememrintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Barowila. Artinya bahwa penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur Desa dalam pergelolaan dokumen-dokumen Desa secara keseluruhan sehingga aparatur Desa mampu untuk menginput data secara lebih cepat daripada menggunakan cara manual.

B. Saran

Adapun saran yang diajukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah Desa di harapkan untuk lebih meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas masing-masing aparatur Desa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dimana kompetensi merupakan variable terendah dari pada variable yang lainnya. Sehingga aparatur Desa diharapkan melakukan pelatihan-pelatihan agar dapat meningkatkan kompetensi di dalam melaksanakan tugasnya.
2. Bagi penelitan selanjutnya diharapkan menambah variable lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa serta memperluas wilayah objek penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Santoso. (2010). Studi Deskriptif *Effect Size* Penelitian-penelitian Di Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, *Jurnal Penelitian*. 14(1). Hlm. 1-17.
- Aksi-Corruption Forum (IACF) tahun 2010.
- Didjaja, Mustopa. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta
- Edison, Emro.,Yohny Anwar., dan Imas Komariyah. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Ekasari Sugiarti, Ivan Yudianto (2017) "*Analisi faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*" (studi pada Desa-Desa di wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Lajalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Padjajaran : Bandung.
- Frinki, Dwight D., dan Klimoski, Richard J. 2004. *Advancing Accountability Theory and Practice: Intorduction to The Human Resource Management Review Special Edition*. Human Resource Management Review. Vol.14, Page 1-17.
- Ghozali, Imam. (2011). "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* ". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hevesi, G. Alan. (2005). *Standar for Internal Control in New York State Government*.
- Hadi, ismono. (2006). *Pendidikan kewarganegaraan (untuk mahasiswa)*. Lampung : universitas Lampung.
- Handoko, T. Hanny. (2006), *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hall, J. A. (2009). *Konsep Pengendalian Internal. Dalam Accounting Information System* (hal. 181). Jakarta: Salemba Empat.
- Jurnali, T. dan Supomo, Bambang. (2002). *Pengaruh Faktor Kesesuaian TugasTeknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik*. *Jurnal*

- Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 5 No. 2 Hal: 214-228.
- Karmila, Amries Rusli Tanjung, dan Edfan Darlis. (2010). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau)*. Jurnal SOROT Volume 9(1):1-121
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) LAN BPKP RI*, Jakarta.
- Lalono, Krina Loina. (2003). *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. (2006). *"perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi sector publik : suatu sarana Good Governance"*. Jurnal akuntansi pemerintah Vol. 2, No.1
- Muhamad, (2014). *"Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif"* , Penerbit :PT Raja Grafind Persada, Jakarta.
- Pramudiarta, Rizal. (2015). *"Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah (studi persepsi pegawai skpd di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal)"*. Skripsi, Universitas di Ponegoro Semarang.
- Ryosidi, Muhammad (2018) *"pengaruh transparansi, kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana Desa (studi empiris pada seluruh desa di kecamatan salo kabupaten kampar)*. Jurnal Economics and Business. Riau Universitas : Pekanbaru. Volume 1, Edisi 1 (Januari-Juni 2018).
- Robbins, S. P. (2007). *Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta:PT. Indeks . Gramedia. Edisi Kesepuluh.
- Rasul, Syahrudin. (2002). *Perintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta : Desail Rekod.
- Sari, Ritna (2018). *Pengaruh transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa*. Skripsi. Universitas Lakidende
- Siahaan, Andika. (2017), *"pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota ambon"*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Syofian Siregar, (2010). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17* , Penerbit : Rajawali Press, Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono (2011), *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Uddin, S., dan T. Hopper. (2001). *A Bangladesh soap opera: Privatization, accounting and regimes of control in a less developed country*. *Accounting Organizations and Society* 26: 643-672.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa.
- Widyatama, Arif. (2017) *"pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa"*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol 2, No 2. Hal:1-20.
- Wilkinson, Josep W and Cerulle, Michael J. (2000). *Accounting Information System Essential Concept and Application, 4 Edition*. New York-USA.
- Wibowo. (2007). *Managemen Kinerja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.